

Implementasi Dana Desa di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba

Andi Fitrah Rezkyah Ramadhani Fachrin
Program Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin
Email: fitraheki12@gmail.com

Abstract

Village Funds are one of the Indonesian government's policy instruments aimed at accelerating rural development, improving the quality of public services, and promoting community empowerment toward self-reliant and prosperous villages. The success of Village Fund implementation largely depends on the ability of village governments to plan, implement, and utilize the allocated budget effectively in accordance with community needs. This study aims to analyze the implementation of Village Funds in Gantarang District, Bulukumba Regency, focusing on village fund planning and utilization, village development implementation, and community empowerment. The study employed a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of Village Funds in Gantarang District has generally been carried out effectively. In terms of planning and utilization, village governments involved community members through village deliberation forums in determining development priorities. Regarding village development, Village Funds were utilized to construct and improve infrastructure and public facilities that support community activities and enhance public services. In terms of community empowerment, Village Funds were used to support various programs aimed at improving community skills and capacities. The implementation of Village Funds has contributed positively to rural development and community welfare improvement, although further optimization is needed to ensure more sustainable outcome.

Keywords: Village Funds, Rural Development, Community Empowerment, Village Planning, Gantarang District.

Abstrak

Dana Desa merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pemberdayaan masyarakat menuju desa yang mandiri dan sejahtera. Keberhasilan implementasi Dana Desa sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan memanfaatkan anggaran secara efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Dana Desa di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba yang ditinjau dari aspek perencanaan dan penggunaan Dana Desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Dana Desa di Kecamatan Gantarang telah berjalan cukup baik. Pada aspek perencanaan dan penggunaan Dana Desa, pemerintah desa telah melibatkan masyarakat melalui mekanisme musyawarah desa dalam menentukan program prioritas pembangunan. Pada aspek pelaksanaan pembangunan, Dana Desa dimanfaatkan untuk pembangunan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, pada aspek pemberdayaan masyarakat, Dana Desa digunakan untuk mendukung berbagai program peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat. Implementasi Dana Desa telah memberikan

kontribusi positif terhadap pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih diperlukan optimalisasi program agar manfaat yang dihasilkan dapat lebih berkelanjutan.

Kata kunci: Dana Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Perencanaan Desa, Kecamatan Gantarang.

PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas pemerintahan terdepan yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan di tingkat desa menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian khusus melalui berbagai kebijakan pembangunan desa, salah satunya melalui program Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa merupakan instrumen fiskal yang dirancang untuk memperkuat kapasitas desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina kehidupan kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan serta potensi lokal yang dimiliki masing-masing desa.

Kebijakan Dana Desa secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Regulasi tersebut menegaskan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan. Kehadiran Dana Desa diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, memperkuat kemandirian desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Implementasi Dana Desa tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang diterima desa, tetapi juga dari kemampuan pemerintah desa dalam merencanakan, mengelola, dan memanfaatkan dana tersebut secara efektif,

efisien, transparan, dan akuntabel. Perencanaan yang partisipatif menjadi aspek penting karena menentukan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran dan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan merupakan indikator keberhasilan pengelolaan Dana Desa dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Kecamatan Gantarang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bulukumba yang terdiri atas sejumlah desa dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang beragam. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa di Kecamatan Gantarang memperoleh Dana Desa yang digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa tersebut diarahkan pada berbagai sektor strategis, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, serta peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur desa.

Meskipun Dana Desa telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan desa, implementasinya masih memerlukan evaluasi secara empiris untuk mengetahui sejauh mana dana tersebut telah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan kebijakan yang ditetapkan. Evaluasi tersebut penting dilakukan mengingat keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, pelaksanaan program pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Beberapa desa di Kecamatan Gantarang menunjukkan variasi dalam pengelolaan Dana

Desa, baik dalam aspek perencanaan, pembangunan, maupun pemberdayaan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi menarik untuk dikaji guna memperoleh gambaran empiris mengenai implementasi Dana Desa serta kontribusinya terhadap pembangunan desa. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan Dana Desa sebagai instrumen pembangunan lokal sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Dana Desa di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba yang ditinjau dari aspek perencanaan dan penggunaan Dana Desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam pengembangan tata kelola Dana Desa yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif untuk menggambarkan implementasi Dana Desa di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Bialo, Desa Bontomasila, dan Desa Padang yang merupakan desa penerima Dana Desa di Kecamatan Gantarang. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan, serta peraturan yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara

kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan dan Penggunaan Dana Desa

Perencanaan Dana Desa di Kecamatan Gantarang dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Proses perencanaan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta menentukan program prioritas yang akan dibiayai melalui Dana Desa. Pelaksanaan perencanaan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk menerapkan prinsip partisipatif dalam pengelolaan Dana Desa sehingga program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa diarahkan pada kegiatan yang mendukung pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alokasi anggaran umumnya difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa, peningkatan pelayanan publik, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menyesuaikan penggunaan Dana Desa dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kebijakan pemerintah mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan penyesuaian kebutuhan masyarakat yang beragam dengan keterbatasan anggaran yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan tidak seluruh usulan masyarakat dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu terus meningkatkan kualitas perencanaan agar penggunaan Dana Desa semakin efektif dan tepat sasaran dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa di Kecamatan Gantarang menunjukkan adanya kontribusi yang cukup signifikan terhadap peningkatan infrastruktur desa. Berbagai kegiatan pembangunan telah dilaksanakan, seperti pembangunan dan perbaikan jalan desa, pembangunan drainase, sarana air bersih, serta fasilitas umum lainnya yang mendukung aktivitas masyarakat.

Pembangunan infrastruktur tersebut memberikan dampak positif terhadap aksesibilitas masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Keberadaan infrastruktur yang memadai juga mendukung mobilitas masyarakat serta mempermudah akses terhadap berbagai layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat desa.

Selain pembangunan fisik, pelaksanaan Dana Desa juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan melalui sistem swakelola. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi melalui kesempatan kerja sementara, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada penyediaan sarana fisik, tetapi juga pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan desa di Kecamatan Gantarang telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kualitas pembangunan serta keberlanjutan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama penggunaan Dana Desa selain pembangunan infrastruktur. Di Kecamatan Gantarang, program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan

melalui berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kemandirian masyarakat. Program-program tersebut meliputi pelatihan keterampilan, penguatan kelompok masyarakat, serta kegiatan yang mendukung pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa.

Pelaksanaan program pemberdayaan menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan desa. Melalui berbagai kegiatan pemberdayaan, masyarakat diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga maupun masyarakat secara umum.

Meskipun program pemberdayaan telah dilaksanakan, manfaat yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan melalui pengembangan program yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan potensi lokal masing-masing desa. Program pemberdayaan yang berbasis kebutuhan dan potensi masyarakat akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian masyarakat dalam jangka panjang.

Implementasi Dana Desa di Kecamatan Gantarang telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Perencanaan yang partisipatif, pembangunan infrastruktur yang mendukung kebutuhan masyarakat, serta pelaksanaan program pemberdayaan menunjukkan bahwa Dana Desa telah berfungsi sebagai instrumen pembangunan desa. Namun demikian, peningkatan efektivitas perencanaan, optimalisasi pelaksanaan program, dan penguatan pemberdayaan masyarakat tetap diperlukan agar tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dapat tercapai secara lebih optimal.

KESIMPULAN

Implementasi Dana Desa di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba telah dilaksanakan melalui perencanaan dan penggunaan Dana Desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat. Pada aspek perencanaan dan penggunaan Dana Desa, pemerintah desa telah menerapkan mekanisme perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa sehingga program yang direncanakan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Penggunaan Dana Desa juga telah diarahkan pada kegiatan yang mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada aspek pelaksanaan pembangunan desa, Dana Desa telah dimanfaatkan untuk pembangunan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas masyarakat, seperti jalan desa, drainase, dan fasilitas umum lainnya. Pembangunan tersebut memberikan manfaat dalam meningkatkan aksesibilitas, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, serta mendukung pelayanan publik di tingkat desa. Selain itu, pelaksanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat turut meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Sementara itu, pada aspek pemberdayaan masyarakat, Dana Desa telah dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat. Program pemberdayaan yang dilaksanakan menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong kemandirian masyarakat. Secara keseluruhan, implementasi Dana Desa di Kecamatan Gantarang telah memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih diperlukan upaya penguatan

program agar manfaat yang dihasilkan dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, D.F., & Kurrohman., T. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2 (3), 2014, 473- 485
- Agustin, A., Sjamsuddin,S., & Pratiwi,R.N., Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Vol. 2, No. 4, Hal. 735-739
- Astuty, E., & Fanida, E.H. 2011. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan. *Jurnal Penelitian Akuntansi Desa*. Hlm 1-19
- Azwardi, & Sukanto. 2014. Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Juni 2014 Volume 12, No.1 Hal: 29 – 41
- Bastian, Indra. 2015. Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa. Penerbit Erlangga: Jakarta
- Bhudianto, Wahyu. 2014. Kerjasama Antar Desa Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan. *Transformasi* No. 26 Tahun 2014 Volume I Halaman 1 – 51
- Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif “Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi”. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Dura Justika. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubungklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal Jibeka* Volume 10, 1 Agustus 2016.
- Egi Yalti Meisya. 2020. *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten*

- Aceh Tengah. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif.: Teori Dan Praktik Jakarta: Pt Bumi Aksara. 2017.
- Hamid Alfian. 2016. Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris Di Kecamatan Bontorannu Kabupaten Gowa). Skripsi. Universitas Negeri Alauddin Makassar. 2016.
- Irawan, Nata. 2017. Tata Kelola Pemerintahan Desa Era Uu Desa, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Karimah,F., Saleh,C., Dan Wanusmawatie, I. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 2, No. 4, Hal. 597-602.
- Kholmi Masyiah. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Dan Desa : Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Ekonomika-Bisnis, Vol. 7 No.2 Bulan Juli 2016.
- Milles Dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, Hlm. 16.
- Moleong, J, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif, Pt. Remaja Rosdakarya: Bandung Muh. Nur Akbar, Analisi Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bulukumba, 2015.
- Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah. Jakarta:
- Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Desa Terkait Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Sri Palupi. Dkk. 2016. Buku Panduan Pelaksanaa Undang-Undang Desa Berbasis Hak.
- Cetakan 1. Lembaga Kajian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.